

**RELEVANSI POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI  
POLITIK MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI  
(Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik  
Propinsi Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Dalam Politik Islam**



Oleh:

**MUCHOIRINA**

**NIM. E04206011**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. PFG
SI-2010 001 PI	U-2010/PI/001
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM**

**MARET 2010**

GADJAHBELANG  
8439407-5953789















## DAFTAR TABEL

I. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	46
II. Jumlah Penduduk Mata Pencaharian.....	48
III. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan umur.....	50
IV. Jumlah Penduduk menurut Agama.....	51
V. Sarana dan prasarana pendidikan.....	53
VI. Saran dan prasarana Sekolah Dasar Negeri.....	54
VII. Sarana dan prasarana Sekolah Madrasah Ibtidaiyah.....	54
VIII. Sarana Dan Prasarana Peribadatan.....	55
IX. Sarana dan prasarana kesehatan.....	55
X. Tenaga Kesehatan Di Desa Karangrejo.....	56
XI. Sarana dan prasarana perekonomian.....	57
XII. Organisasi kesenian dan kebudayaan.....	58
XIII. Organisasi olah raga.....	59
XIV. Organisasi Elemen Tata Pemerintahan Desa.....	59
XV. Identitas Informan berdasarkan tingkat pendidikan.....	63
XVI. Identitas Informan berdasarkan Agama.....	64
XVII. Identitas Informan berdasarkan tingkat umur.....	65
XVIII. Identitas informan berdasarkan jenis kelamin.....	66
XIX. Identitas informan berdasarkan organisasi.....	67





Hilangnya otonomi desa secara jelas tampak dari kebijakan orde baru, yakni pembangunan masyarakat desa tertumpu pada kepentingan utama yakni kepentingan untuk memasukkan desa kedalam negara, dan memasukkan negara kedalam desa. Upaya-upaya ini dituangkan kedalam berbagai kebijakan pemerintah dengan penyeragaman struktur pemerintahan desa. Upaya penyeragaman struktur pemerintahan desa dimaksudkan untuk mengontrol serta bentuk sentralisasi kekuasaan yang melemahkan kewenangan desa. Ini dapat kita lihat pada pemerintah kabupaten yang masih mengintervensi desa dalam hal pengelolaan urusan pemerintah desa. Akibatnya pemerintah desa tidak dapat menentukan kewenangan yang dikehendaknya, yaitu secara otonomi.

Pemahaman tentang desa selalu dikaitkan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis yakni antar warganya saling kenal baik, relatif homogen dan banyak tergantung langsung pada alam. Desa sering dimaknai sebagai komunitas masyarakat sederhana pada sektor agraris mempunyai ikatan sosial, adat, dan tradisi masyarakat yang masih kultural serta tingkat pendidikan rendah. Tapi desa dapat pula sebagai suatu organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang dalam struktur pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 206 ada empat urusan pemerintah desa yaitu: a) Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b) Urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya pada desa; c) Tugas pembantu dari pemerintah, propinsi,



Dengan dibukanya ruang publik yang luas sangatlah memungkinkan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat desa. Pemerintahan kabupaten dalam hal ini memberikan kebebasan terhadap desa dalam pengelolaan urusan pemerintahan desa tetapi secara tidak langsung pihak kabupaten telah mengambil hak dari desa dalam hal proses pengambilan kebijakan desa, dan segala urusan masih bergantung pada pihak Kabupaten/kota. Hal ini akan berakibat tidak adanya kemandirian desa dalam urusan pemerintahan desa.

Wilayah Indonesia sebagian besar masyarakatnya tinggal di pedesaan merupakan kondisi yang sangat strategis dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Untuk mencapai kondisi pemerintahan yang baik dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat desa dalam mewujudkan otonomi desa. Jadi, pada dasarnya sudah tidak relevan lagi bagi suatu pencapaian otonomi desa, ruang publik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mengartikulasikan kepentingan mereka masih dipolitisi oleh negara. Partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan otonomi merupakan tantangan bagi masyarakat desa untuk lebih mampu menganalisa dan mengatur serta mengelola kepentingan yang berhubungan dengan masalah desa.

Otonomi desa memiliki makna bahwa penyerahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa dalam hal pengurusan rumah tangga desa, berdasarkan dari aspirasi masyarakat setempat dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam menjalankan kemandirian atau pengurusan rumah tangga desa. Desa dalam hal ini hanya sebatas menjalankan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota saja bukan berdasarkan otonomi asli itu sendiri. Oleh karena itu otonomi desa bukanlah otonomi asli dan utuh.



















lainnya, data primer hasil pembicaraan dengan informan tetap dianggap sebagai sumber. Adapun data primer dalam penelitian berasal dari warga masyarakat, tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa yang berhubungan dalam pembuatan kebijakan desa sebagai *key informan*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan karena penerapan suatu teori.<sup>11</sup> Adapun data sekunder yang digunakan peneliti adalah dengan buku-buku referensi yang terkait dengan penelitian.

### 4. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian ini terdiri atas beberapa tahap, antara lain tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Tiga tahapan ini merupakan buah pikiran yang dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Robert Bogdan, dia adalah seorang pakar ilmu sosial dalam buku karyanya yang berjudul "*Metodologi Penelitian Kualitatif*".

#### a. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan sebuah langkah awal di dalam melakukan sebuah penelitian. Bentuk dari tahap dan langkah awal ini adalah peneliti mengawali dengan membuat proposal penelitian, memilih lapangan penelitian dengan pertimbangan letak geografis serta hemat dan praktisnya dalam mempergunakan waktu, tenaga dan biaya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87-88.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 27-128.

Oleh karena itu peneliti memilih lokasi penelitian di desa Karangrejo karena dinilai tidak terlalu jauh dari rumah kediaman peneliti.

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengadakan penjajakan lapangan, kemudian peneliti berusaha untuk:

1. Menemukan masalah
  2. Menemukan topik dan fokus masalah
  3. Membuat desain penelitian berupa penentuan rancangan penelitian
  4. Memilih lapangan penelitian
  5. Mengurus perizinan dan instansi terkait
- b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah mempersiapkan segala hal yang terkait dengan persiapan pada tahap pra lapangan, selanjutnya peneliti melakukan:

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Untuk dapat memahami latar penelitian, peneliti meminta keterangan terkait dengan sasaran penelitian dan mulai mempersiapkan diri secara fisik maupun mental.

- 2) Tahap memasuki lapangan

Pada tahap ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan ikut berperan serta dalam kegiatan di lapangan guna memperoleh data yang ada di lapangan. Ketika memasuki lapangan, peneliti harus mampu menjalin hubungan yang akrab dengan subyek penelitian serta mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan dan kebiasaan, menggunakan tutur kata yang baik, sopan, kekeluargaan dan menjaga norma-norma yang berlaku di lapangan penelitian tersebut agar kehadiran peneliti dapat diterima dengan baik.









masyarakat atau disebut juga dengan rembuk desa, di dalam menentukan suatu kebijakan ditingkat desa.

#### 4. Focus Group Discussion (FGD)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik FGD yang tujuannya adalah untuk mengetahui secara lebih detail tentang penelitian yang diteliti dengan melalui tatap muka, diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang relevan dalam desa.

### 6. Teknik Analisis Data

Dari data yang terkumpul peneliti analisa secara interpretatif artinya dari bentuk pengalaman di lapangan hasil observasi terhadap kebiasaan dari hasil wawancara dan dari hasil dokumentasi maka peneliti berusaha menginterpretasikan atau memaknai terhadap pernyataan informasi yang diperoleh dalam pengumpulan data tersebut. Secara rinci peneliti sendiri pertama berusaha mencari data-data yang termasuk data sekunder yakni dengan cara dokumentasi dengan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mencapai kredibilitasnya dari dokumen-dokumen yang diperoleh penulis masih menambah lagi dengan observasi secara langsung dan mendalam pada lokasi penelitian untuk mendialogkan data yang ada dengan teori yang penulis paparkan. Kemudian penulis menambahkan dengan data-data dari metode wawancara dari pihak-pihak berkompeten di lokasi penelitian yang mana dalam melakukan wawancara, penulis mewawancarai sejumlah tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda dan kepala desa sendiri selaku pemerintah desa, serta kepala dusun selaku perangkat desa sehingga dari berbagai data yang diperoleh dalam teknik pengumpulan data baru penulis dapat menginterpretasikan atau menyimpulkan



yang penting dalam pemeriksaan keabsahan data. Maka peneliti menggunakan hal tersebut dengan teliti, rinci, dan berkesinambungan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.\*

Bab kedua Kajian Pustaka yang berisi tentang pola kepemimpinan kepala desa, partisipasi politik masyarakat dan otonomi.

Bab ketiga Deskripsi Data yang berisi tentang profil desa Karangrejo meliputi pemerintahan desa, keadaan geografis, data kependudukan dan tenaga kerja, sarana prasarana dan organisasi desa Karangrejo.

Bab keempat berisi analisa data, yaitu analisis relevansi pola kepemimpinan kepala desa dan partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan otonomi.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian dilengkapi saran-saran dan penutup.





otonomi daerah telah mendorong kebutuhan pemimpin yang legitimasi dan efektifitas pemerintah.

Maraknya desentralisasi dan demokrasi lokal yang telah mendorong kuatnya desakan pemilihan pemimpin lokal yang lebih legitimasi. Jadi dibutuhkan pemimpin yang berkualitas, dan tanggung jawab apa yang dipimpinya. Oleh sebab itu kita harus mengetahui siapa pemimpin itu. Seperti yang dikemukakan oleh CASE bahwa pemimpin harus mengenal dirinya atau sifat-sifatnya, mengenal kelompok yang dipimpinya, mengenal situasi dan kondisi. Serta yang dikemukakan oleh *Raphl Currier Davis* pemimpin adalah suatu kelompok yang sedang bekerja kearah tujuan bersama dibawah kepemimpinan, dan menurut *Curtois* menyatakan bahwa pemimpin di ibaratkan sebuah tubuh manusia. Tubuh ini mempunyai makna pemimpin berkedudukan sebagai pusat inspirasi, koordinasi, aktualialisasi dan pengendalian.<sup>3</sup>

Dari pemaparan mengenai pemimpin diatas dapat kita simpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan, baik yang disebabkan oleh kedudukan maupun kepribadian, untuk mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

Pemimpin dapat dijelaskan bahwa suatu kelompok sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Kepemimpinan merupakan masalah pokok dalam suatu kelompok atau organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa maju mundurnya suatu organisasi ditentukan oleh pemimpin.

---

<sup>3</sup> Y.W Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 49.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hakekat kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang-orang bekerjasama melakukan kegiatan tertentu dalam rangka mewujudkan suatu tujuan secara efektif dan efisien.

Masalah kepemimpinan sangat ditentukan oleh situasi sosial, sehingga seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menguasai yang dipimpinnya. Sebab apabila pemimpin tidak bisa menguasai yang dipimpinnya akan membuat hancurnya tempat yang dipimpin seorang pemimpin. Dalam menjalankan tugasnya pemimpin akan serasa berguna jika memiliki daya (*power*) atau kemampuan menggunakan kekuatan.

Kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu merupakan ciri bawaan psikologis yang dibawah Sejak lahir, khususnya pada dirinya dan tidak pada orang lain. Sehingga pemimpin itu disebut “born Leader” (dilahirkan sebagai pemimpin)<sup>4</sup> jadi seorang pemimpin membutuhkan suatu kemahiran dan ketauladanan pada yang dipimpinnya.

## 2. Pola kepemimpinan

Ada beberapa pola atau tipe kepemimpinan sebagai berikut:

- a. Karismatis.
- b. Paternalistis dan Maternalistis.
- c. Militeristis.
- d. Otokratis/otoritatif (*authoritative, dominator*).
- e. Laissez faire.
- f. Populistis.

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *pemimpin dan kepemimpinan*, 87.



- g. Administratif.
- h. Demokratis (*group developer*).<sup>5</sup>

Dalam hal ini dapat dijelaskan masing-masing tentang tipe kepemimpinan diatas yaitu:

1) Tipe Karismatis

Tipe kepemimpinan karismatis ini kekuatan energi, daya tarik dan pembawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya.

2) Tipe Paternalistis dan Maternalistis

Tipe kepemimpinan yang kebabakan, dengan sifat-sifat antara lain sebagai berikut: dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. dia bersikap terlalu melindungi (*overly protective*).

3) Tipe Militeristis

Tipe ini sifatnya sok kemiliter-militeran. Hanya gaya luaran saja yang mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat militeristis adalah lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando terhadap bawahannya keras sangat otoriter kaku dan seringkali kurang bijaksana.

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *pemimpin dan kepemimpinan*, 80-81.

4) Tipe Otokratis/otoritatif (*authoritative, dominator*)

Otokrat berasal dari perkataan *autos* = sendiri; dan *kratos* = kekuasaan, kekuatan. Jadi otokrat berarti penguasa absolut.

5) Tipe Laissez faire

Pada tipe kepemimpinan Laissez faire ini sang pemimpin praktis tidak memimpin dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri. Dia merupakan pemimpin simbol, dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis. Sebab duduknya sebagai direktur atau pemimpin ketua dewan, komandan, pemimpin biasanya diperolehnya melalui penyogokan, suapan atau berkat sistem nepotisme.

6) Tipe Populistic

Menurut Meter Worsley dalam bukunya *The Third World* mendefinisikan kepemimpinan populistic sebagai kepemimpinan yang dapat membangun solidaritas rakyat misalnya Soekarno dengan ideology marhaenismenya, yang menekan kesatuan nasional, nasionalisme, dan sikap yang berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan, penghisapan serta penguasaan oleh kekuatan-kekuatan asing (luar negeri).



dijabarkan dan dimanifestasikan melalui putusan-putusan dan kebijaksanaan pimpinan.<sup>6</sup>

Dalam usaha mencapai keberhasilan, pimpina suatu organisasi hendaknya mengerti dan mampu menerapkan berbagai gaya kepemimpinan. Pemimpin harus dapat membaca situasi dan kondisi supaya dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang dilmiliki. Jadi dengan demikian sorang pemimpin harus dapat berperan sebagaimana mestinya agar dapat memahami kondisi yang dipimpinnya dengan baik, sehingga dapat mengambil tindakan yang terbaik dalam pengambilan keputusan demi tercapainya kesuksesan.

Istilah gaya kepemimpinan secara sederhana di ungkapkan oleh Miftah Thoha adalah sama dengan cara yang digunakan pimpinan dalam mempengaruhi pengikutnya. Selain itu Miftah Thoha juga memberikan batasan gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut: “Gaya kepemimpinan adalah merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain”.

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa gaya kepemimpinan merupakan suatu sikap atau perilaku tertentu yang dilakukan oleh pimpinan dalam upaya menggerakkan dan mempengaruhi bawahan agar mereka bersedia bekerjasama dan bertindak sesuai dengan tujuan bersama.

Pemilihan pemimpin lokal hendaknya membawa gagasan dan ide dari masyarakat itu sendiri, sebab hidup di masyarakat mengenai pemimpin mereka ada konsep tentang bapak pelindung, pemimpin yang

---

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: UGM Press, 1993), 74.

penuh welas asih, dan suritaualan yang patut dicontoh. Untuk mendapatkan kualitas-kualitas yang diperlukan menjadi seorang pemimpin.

Langkah pertama yang harus diambil adalah membangun nama baik, sesuatu yang terkait dengan kredibilitas. Nama baik ini diberikan dengan membuat jasa, kemampuan seseorang memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perbuatan tertentu. Kita telah melihat bagaimana para pemimpin harus mendistribusikan sumberdaya mereka, melindungi desa dari gangguan luar, dan memberikan petunjuk-petunjuk yang baik kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan seorang pemimpin diharuskan memilih pembantu untuk memimpin kelompok, bidang bagian, dan urusan lain yang tidak harus pemimpin yang memimpinnya. Kita ketahui disini bahwa pemimpin adalah orang yang dapat memimpin orang lain kearah pencapaian tujuan bersama.

Etnografi tentang kekuasaan ini terkonsentrasi terutama pada aspek-aspek kepemimpinan yang berbasis kepada masyarakat. Salah satu factor tambahan menjadi seorang pemimpin lokal/desa adalah negara. Tanpa loyalitas Negara seseorang tidak akan mampu memanjat tangga kekuasaan pemerintahan.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa dalam proses pemilihan pemimpin lokal dibutuhkan keikutsertaan dari masyarakat itu, sebab pemilihan pemimpin tidak hanya didominasi oleh pemerintah saja tetapi masyarakat yang menerima kebijakan dari pemimpin tersebut. Jadi

---

<sup>7</sup> Hans Anlov, *Negara Dalam Desa(Patronase Kepemimpinan local)*, Lappera, 9-12.

pola kepemimpinan yang bisa diterapkan dalam pemilihan pemimpin lokal adalah bersifat demokratis yang artinya pemimpin yang bercampur baur dengan masyarakat yang intinya adalah membangun partisipasi masyarakat, memperhatikan masyarakat dan memperjuangkan kelompoknya dari halangan dan rintangan demi kemajuan wilayahnya. Oleh karena itu pemimpin yang mengayomi dan memperhatikan masyarakatnya.

#### 4. Kriteria Pemimpin

Eggi Sujana yang merupakan seorang eksponen generasi muda, mengatakan secara tajam bahwa dalam sejarah umat manusia belum satupun dapat terwujud sosok pemimpin sehebat kepemimpinan Rasulullah SAW, Eggi Sujana pun melontarkan sejumlah kriteria persyaratan yang harus ada dalam sosok seorang pemimpin, dari apa yang berusaha ia selama dari keteladanan kepemimpinan Rasulullah Saw, yaitu:

- a. Pemimpin harus dekat dengan Tuhan dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai dan ajaran Tuhan yang baik dan luhur.
- b. Pemimpin haruslah seorang yang ikhlas, tanpa mengharap pamrih kecuali untuk beribadah pada Tuhan melalui pengabdianya kepada rakyat.
- c. Pemimpin harus sosok yang jujur dan adil. Dan khalifah Umar bin al-Khattab merupakan contoh pemimpin yang mampu membedakan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan Negara.
- d. Pemimpin harus mencintai rakyat dan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan diri, keluarga.







dilakukan melalui media massa yang ada, misalnya dengan menulis pikiran pembaca pada sebuah koran atau majalah tentang hal-hal yang menjadi agenda Publik.

Pada konteks desa upaya warga masyarakat dalam berpartisipasi untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan Publik adalah dapat diinterpretasikan dalam lingkup desa dan lembaga eksekutif desa yang merupakan lembaga perwakilan.

Sedangkan partisipasi politik menurut *Samuel Huntington dan Joan, M.Nelson* mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Demikian juga dengan pendapat di atas dapat pula dijelaskan makna partisipasi adalah kegiatan warga negara dalam bentuk fisik seperti bentuk partisipasi *electoral activity* yakni suatu bentuk partisipasi masyarakat yang berkaitan langsung dengan pemilu, kemudian lobbying yakni keterlibatan masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah. Bentuk seperti itu akan mempengaruhi keputusan dan kebijakan Publik pemerintah. Dalam konteks otonomi warga masyarakat hendaknya dapat menggunakan partisipasinya demi kelancaran terwujudnya otonomi desa.

Dari pemaparan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan tentang partisipasi yakni adanya keterlibatan masyarakat atau anggota dari organisasi pemerintah secara fisik misalnya dilihat dari bagaimana masyarakat ikut serta dalam menikmati hasil kebijakan yang telah dirumuskan. Sedangkan keterlibatan warga masyarakat mempunyai

---

<sup>12</sup> Samuel Huntington dan Joan M. Nelson "Inu Kencana Syafie", *Sistem pemerintahan Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 125-126.

kebebasan dan terlibat dalam penentuan kebijakan, bagaimana masyarakat terlibat dalam pengawasan (*control*) bagi jalannya tata pemerintahan khususnya ditingkat desa.

## 2. Partisipasi Politik Masyarakat dalam pembuatan kebijakan

Dalam negara-negara demokrasi peranan partisipasi politik yang luas dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa seperti dikatakan oleh Miriam Budiarto bahwa:

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui nama mereka untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasasecara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengambilan kebijakan.

Keikutsertaan masyarakat desa dalam merumuskan kebijakan dalam tata pemerintahan desa juga merupakan salah satu indikasi Andia salah satu partisipasi masyarakat desa dalam memformulasikan tata pemerintahan desa, lembaga yang berperan sebagai lembaga legislatif desa yakni BPD merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan desa bersama-sama dengan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama perangkat desa. Masyarakat desa merupakan unsur penerima dari kebijakan pemerintah haruslah terlibat juga dalam bidang dan urusan dalam kebijakan yang akan dikeluarkan dalam proses perwujudan otonomi. Oleh karena itu, diharapkan akan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di desa dalam konteks perwujudan otonomi desa, akan tercapai dengan memperhatikan unsur-unsur yang mengutamakan adanya partisipasi masyarakat dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik.

Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi

keputusan politik, jadi masyarakat disini diikutsertakan dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>13</sup> Kegiatan warga negara pada dasarnya dibagi dua, yakni mempunyai kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Keikutsertaan dari warga masyarakat desa sebagai anggota dari organisasi desa yang terdapat unsur-unsur Negara (*state*), masyarakat politik, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil dalam mengelolah pemerintahan dan mempengaruhi keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah desa yakni kepala desa seperti yang telah disebutkan diatas bahwa, keikutsertaan warga masyarakat lebih ditekankan pada suatu bentuk kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik seperti keikutsertaan dalam bentuk sikap-sikap dan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan. Bentuk keikutsertaan warga masyarakat desa tercermin dalam bentuk bagaimana warga masyarakat mampu untuk menyikapi keberadaan dan tata pemerintahan yang sedang berjalan, kemudian selain itu bentuk keikutsertaan masyarakat juga adanya keikutsertaan dalam arena politik desa sebagai lembaga kontrol bagi terselenggaranya pemerintahan desa, bagaimana warga masyarakat terlibat dalam relasi atau hubungan antara unsur-unsur di desa kemudian yang terakhir adalah bagaimana warga masyarakat ikut serta dalam menikmati suatu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah desa.

---

<sup>13</sup> Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Coromedia Widiasarana Indonesia, 1992), 140.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson Partisipasi politik masyarakat desa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan secara lebih jelas dapat dikategorikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Electoral Activity

Yakni segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan pemilu. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta memberikan sumbangan untuk kampanye sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik atas nama partai itu, memberikan suara dalam pemilu, melaksanakan pelaksanaan pemberian dan perhitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan.

b. Lobbying

Tindakan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan ataupun untuk memobilisasi dukungan atau tantangan terhadap masalah-masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah ataupun lembaga perwakilan rakyat.

c. Organizational Activity

Yaitu keterlibatan masyarakat dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis, ataupun sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Menjadi anggota saja sudah menunjukkan elemen dari partisipasi



bukan partisipasi politis. Hal ini tidak akan memberikan makna signifikan bagi pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Indikasi adanya partisipasi dalam perwujudan otonomi desa tercermin dengan adanya keikutsertaan masyarakat diadalam menyikapi dan mengkritisi keberadaan otonomi desa. Artinya masyarakat haruslah berperan aktif dalam menjalankan fungsi voice, akses dan kontrol terhadap kebijakan yang dibuat. Selain itu dalam mewujudkan otonomi. masyarakat juga dituntut untuk ikut serta dan terlibat dalam pola hubungan antara masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sipil (*Civil society*), keikutsertaan masyarakat desa dalam pola hubungan dengan pemerintah desa sangatlah diperlukan karena dengan relasi dan hubungan yang dekat antara warga masyarakat akan terciptanya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **C. Otonomi**

#### **a. Pengertian Otonomi Desa**

Otonomi desa adalah penyerahan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus desa atau tempatnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan komunitas yang terbentuk secara mandiri oleh masyarakat. Bahkan desa mempunyai “otonomi asli” ketimbang negara atau kabupaten. Tetapi kalau kita lihat bahwa kehidupan desa tidaklah tunggal dan homogen, karena masuknya negara dan pemodal asing kedalam tubuh desa. Akibatnya desa telah diintegrasikan ke negara, ini berdampak pada hilangnya *self governing community*. Negeranisasi secara sistemik kedesa telah membuat otonomi asli desa menjadi hilang, serta menghantarkan *self*

*governing community* pada keberagaman identitas local. Selanjutnya secara internal masuknya Negara kedalam desa juga menimbulkan pemudaran kondisi demokrasi komunitarian. Akibatnya ajang pencapaian demokrasi ditingkat desa belum terlaksana dengan baik.<sup>15</sup>

Menurut Lennart Lundquist konsep otonomi terdiri dari dua dimensi utama, yaitu: kebebasan bertindak dan kapasitas untuk bertindak. Kebebasan bertindak pemerintah lokal ditafsirkan mengacu pada kesempatan institusi dan regulasi yang dijamin oleh legislasi dan konstitusi. Kebebasan bertindak adalah hak untuk memutuskan cara tindakannya sendiri, dengan melakukan cara desentralisasi untuk meningkatkan hak-hak pemerintah lokal.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang telah kita paparkan sebelumnya bahwa otonomi itu merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa sendiri, kita ketahui bahwa penyerahan kewenangan ini hanya sebatas kewenangan dalam menjalankan pemerintahan saja bukan kewenangan penuh yang diberikan kepada desa. Tetapi sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, bahwasanya desa dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pihak Kabupaten/Kota dalam urusan rumah tangga desa, serta dalam konteks otonomi bagaimana kewenangan yang diberikan oleh pihak kabupaten terhadap desa dalam urusan pemerintahan desa.

---

<sup>15</sup> Jendela, bulletin STPMD"APMD" Yogyakarta, Otonomi desa hal 9.

<sup>16</sup> Sauhatman, *Transformasi Ekonomi Politik Desa*, Trj. Gregorius Sahdan, Sutoro Eko, 98-99

## b. Desa di Era Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada desa secara otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada desa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan menjadi tanggung jawab desa sepenuhnya. Dalam hal ini prakasa sepenuhnya diserahkan kepada desa baik yang menyangkut penentuan, kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut pendanaan.

Perubahan pemerintahan desa semakin terarah ketika agenda desentralisasi dan demokratisasi dibingkai. Perubahan tersebut telah memberikan garansi formal dan ruang bagi desa untuk membangun kemandirian (otonomi), ruang bagi eforia kebangkitan semangat lokalitas dan otonomi desa, mendorong tata pemerintahan yang baik, membuat demokrasi bekerja, serta mewujudkan pembangunan yang berbasis masyarakat desa.

Kebijakan desentralisasi desa selama ini memperlihatkan keberagaman antar daerah. Dapat kita contohkan Sumatra Barat adalah pelari terdepan dalam kerangkah desentralisasi dari daerah-daerah yang lain. Ini dalah sebuah bukti bahwa kepekaan masyarakat dalam membangun daerahnya.ditingkat bawah desentralisasi telah membawah perubahan, dan semngat baru untuk memulihkan identitas lokal dan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.

Penyerahan urusan pemerintahan kepada desa, dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan desa yang



bersangkutan. Dengan demikian, maka otonomi tersebut berbeda antara desa yang satu dengan yang lainnya. Berbagai urusan telah diserahkan kepada desa, sebagai asas desentralisasi tetapi tanggung jawab terakhir maiz berada ditangan pemerintah.

Otonomi desa dimaksudkan sebagai media perwujudan tujuan bersama. Dimensi otonomi desa mencakup eleven ekonomi, social, politik, dan negara. Keberadaan desa dalam bingkai negara, berkaitan dengan sejauhmana otonomi desa berhubungan dengan demokratisasi yang tumbuh dan berkembang selama ini. Arena otonomi desa mencakup otoritas pemerintahan desa, kapasitas finansial, kapasitas untuk implementasi kebijakan dan otoritas untuk mendevolusi *policy making* pada tingkat yang lebih rendah. Otoritas pemerintahan desa bersumber dari adat dan supra desa, yang artinya sejauhmana otoritas desa dihadapkan dengan otoritas pemerintahan atasnya. Sedangkan kapasitas desa dalam mengimplementasikan kebijakan mencakup sejauhman desa memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap kebijakan pembangunan daerah atau investor yang menghendaki alih fungsi lahan wilayah desa.

Pemahaman tentang otonomi desa lebih kepada kewenangan desa melakukan tindakan hukum, tindakan hukum itu mencakup sebagai berikut: dalam bukunya Soetardjo kartohadikusumo adalah mengambil keputusan atau membuat peraturan yang mengikat warga deas atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut pada penyelenggaraan rumah tangganya, menjalankan pemerintah desa, memili kepala desa, memiliki kekayaan sendiri, memiliki tanah sendiri, dan adanya peradilan desa, namun semua ini adalah semata-mata demi kesejahteraan masyarakat desa.



tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>17</sup>

Usaha pendesakan otonomi kepada desa, harus diletakkan sebagai langkah awal untuk memperkuat dan mengurangi intervensi dan memberikan otoritas penuh kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Merupakan proses awal dan suatu subsidi untuk pembelajaran bagi desa agar lebih mandiri. Apalagi langkah ini akan memberikan jaminan bagi demokrasi. Struktur social masyarakat desa sendiri, memang tidak memberikan jaminan demokrasi. Karena itulah, langkah yang diperlukan adalah usaha untuk mendorong demokratisasi ditingkat lokal.

---

<sup>17</sup>Conchelos, *Promosi Otonomi Desa*, 22.

## **BAB III**

### **PROFIL DESA KARANGREJO**

#### **A. Pemerintahan Desa**

Desa karangrejo terdiri dari 20 Rukun Tetangga dan 8 Rukun Warga, Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa yang mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana, walaupun hanya S1 diharapkan Kepala Desa mampu untuk memformulasikan tata pemerintahan desa dalam rangka perwujudan otonomi. Sekretaris Desa yang berlatar belakang pendidikan SLTA berdomisili di Rukun Tetangga IV, bertugas sebagai pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Dalam desa ini juga terdapat lembaga legislatif desa dalam hal ini adalah BPD yang berjumlah 8 orang. Yang secara rinci mempunyai latar belakang pendidikan SLTA.

#### **B. Keadaan Geografis**

##### **1. Letak dan batas wilayah**

Secara geografis desa Karangrejo mempunyai luas wilayah 220.3185 HA terletak dikecamatan Ujungpangkah, kabupaten gresik, propinsi Jawa Timar. Dalam hal ini desa Karangrejo memiliki batas wilayah yang memisahkan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya.

Berikut ini batas-batas wilayah desa Karangrejo:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujungpangkah.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidayu.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketapang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kebun Agung.

## 2. Keadaan Tanah/Topografi

Desa Karangrejo pada dasarnya mempunyai keadaan tanah atau topografi yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah hingga mencapai semua wilayah Desa Karangrejo. Desa Karangrejo juga mempunyai areal persawahan seluas 82.575 Ha, juga mempunyai areal kering yang terdiri dari tanah legal/tanah ladang seluas 19.6935 Ha, tanah kuburan seluas 0.8395 Ha, disamping itu desa juga mempunyai tanah lapangan seluas 0.7500 Ha, serta lain-lainya sebesar 12.4560 Ha.

Secara umum wilayah Desa Karangrejo yang merupakan dataran rendah mempunyai areal tanah terdiri dari:

- a. Tanah sawah seluas 82.5750 Ha, terdiri dari: tanah berpengairan teknis seluas 80.5750 Ha.
- b. Tanah kering seluas 112.3085 Ha, terdiri dari:
  - 1) Tanah tegal seluas 19.6935 Ha
  - 2) Tanah bangunan seluas 78.5695 Ha
  - 3) Tanah kuburan seluas 0.8395 Ha
  - 4) Tanah lapangan seluas 0.7500 Ha

## 3. Keadaan air

Desa Karangrejo yang terletak pada dataran rendah, yang keadaan airnya tidak memprihatinkan sebab tanah di Desa Karangrejo mengandung air. Keadaan air untuk pengairan areal persawahan tidak mengalami hambatan, melainkan pada musim hujan kondisi air mengalami kelebihan, dan sebagian wilayah desa Karangrejo ada yang kebanjiran. Sedangkan

untuk air bersih kebutuhannya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Desa tersebut.

#### 4. Keadaan iklim dan musim

Keadaan iklim pada wilayah Desa Karangrejo hampir sama dengan iklim Indonesia yakni terbagi menjadi dua, musim hujan dan musim kemarau. Desa Karangrejo mempunyai musim hujan pada bulan November s/d bulan April, sedangkan musim kemarau pada bulan Mei s/d Oktober.

### C. Data Kependudukan dan Tenaga Kerja

#### 1. Penduduk

Berbicara mengenai penduduk tidak terlepas dari wilayah orang yang menempati wilayah tertentu, hal ini dapat kita lihat dari berbagai suku, agama, mata pencarian, jenis kelamin, dan lain sebagainya.

Penduduk adalah semua orang yang tinggal dalam suatu wilayah, yang dapat dikelompokkan berdasarkan umur, agama, jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan lain sebagainya.

Desa karang rejo mempunyai jumlah penduduk 2.621 jiwa dengan rincian sebagai berikut: Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.197 jiwa, Jumlah, penduduk perempuan sebanyak 1.424 jiwa, Jumlah kepala keluarga sebanyak 568 jiwa

Sementara luas desa Karangrejo sebesar 220 km<sup>2</sup> yang penduduknya menempati hampir seluruh wilayah desa Karangrejo.

Sebagaimana kita ketahui begitu besarnya potensi masyarakat desa khususnya Desa Karangrejo yang mempunyai jumlah penduduk yang

cukup besar dan menempati wilayah Desa Karangrejo. Hal ini sangatlah membantu dalam proses terselenggaranya penelitian tentang pola kepemimpinan kepala desa dan partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan otonomi.

Masyarakat Desa Karangrejo secara keseluruhan mempunyai kesamaan agama yakni agama Islam, didalamnya terdapat suatu organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkup desa. Sehingga adanya potensi masyarakat sangatlah mendukung dalam pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa.

## 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenjang atau Tingkat Pendidikan

Kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan modal yang penting dalam pembangunan masyarakat maupun bagi lingkup Negara sendiri.

Tabel 1  
Tingkat Pendidikan Penduduk<sup>1</sup>

No	Jenis pendidikan	Jumlah	Presentasi
1.	SD/Sederajat	493	15%
2.	SLTP	374	14%
3.	SLTA	640	25%
4.	Diploma	63	10%
5.	Perguruan Tinggi	12	5%
	Lain-lain	1.043	31%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.621</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Sumber Data : Monografi Desa Tahun 2009

Dari data diatas diatas terlihat bahwa rata-rata penduduk desa Karangrejo memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini terlihat masih minimnya jumlah masyarakat Desa Karangrejo yang menempuh jenjang pendidikan sarjana atau perguruan tinggi. Akan tetapi apabila dilihat dari jumlahnya, antusiasme masyarakat desa Karangrejo dalam menempuh pendidikan cukup tinggi dari total sebanyak masyarakat sebanyak 2.621 jiwa masyarakat Desa Karangrejo. Berbagai pertimbangan minimnya masyarakat Desa Karangrejo menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat sarjana atau dibawahnya. Salah satu faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut adalah faktor kebutuhan atau faktor ekonomi, karena sebagian masyarakat Desa Karangrejo bermata pncaharian sebagai petani, jadi hal ini yang menjadi faktor penghambat tercapainya pendidikan yang memadai.



### 3. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Tabel 2

Jumlah Penduduk Mata Pencaharian<sup>2</sup>

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	persentase
1.	Pemilik Petani	571 orang	30%
2.	ABRI	20 orang	2%
3.	Pensiunan ABRI	10 orang	2%
4.	Pensiunan Swasta	20 orang	2%
5.	Bidan	2 orang	1%
6.	Guru	40 orang	4%
7.	Pegawai Negeri Sipil	61 orang	6%
8.	Pegawai Swasta	37 orang	2%
9.	Perbengkelan	3 orang	1%
	Lain-lain	1.621 orang	50%
		2.621 orang	100%

Dengan melihat tabel diatas maka jenis mata pencaharian penduduk di Desa Karangrejo sebagian besar adalah petani. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Karangrejo bekerja sebagai petani yakni salah satu faktornya adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai baik segi formal maupun informal. Dari segi formal terlihat minimnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan sampai jenjang sarjana. Dari segi informal terlihat dengan minimnya minat masyarakat mengikuti kursus atau keterampilan khusus seperti bahasa

<sup>2</sup> Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2009

asing, kursus komputer dan lain-lain sebagainya. Disamping itu faktor lain yang menyebabkan masyarakat Karangrejo mata pencariannya bertani dan bercocok tanam, dan salah satu faktor pendukung adalah lahan untuk bertanam yang memadai serta bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Karangrejo seperti yang kita ketahui bersama, sebagian mata pencahariannya adalah sebagai petani. Hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwasannya, masalah pendidikan masyarakat juga dipengaruhi oleh factor ekonomi, sebab kebutuhan ekonomi kalau sudah terpenuhi maka akan memikirkan kebutuhan pendidikan. Dengan keterbatasan itulah maka sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani mengingat lahan pertanian mereka masih bisa dimanfaatkan.

Sektor lain yakni adanya ABRI karena sebagian masyarakat Desa Karangrejo mempunyai kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Mata pencaharian lain sebagian besar jumlahnya yang terdiri dari beberapa kalangan yakni dari guru, pegawai swasta dan kebanyakan remaja dan orang tua yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai mata pencaharian.

#### 4. Jumlah penduduk menurut usia

Data lain yang menunjang penduduk di suatu daerah adalah dilihat dari usia. Berikut data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur.

Tabel 3

Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan umur<sup>3</sup>

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Persentase
1.	0 -12 bulan	24	27	5%
2.	13 bulan-4 bulan	54	81	5%
3.	5 tahun-6 tahun	60	65	5%
4.	7 tahun-12 tahun	96	93	5%
5.	13 tahun-15 tahun	68	87	5%
6.	16 tahun-18 tahun	81	80	5%
7.	19 tahun-25 tahun	158	119	10%
8.	26 tahun-35 tahun	196	212	15%
9.	36 tahun-45 tahun	149	147	10%
10.	46 tahun-50 tahun	110	102	10%
11.	51 tahun-60 tahun	114	150	10%
12.	61 tahun-75 tahun	120	112	10%
13.	>76 tahun	49	67	5%
	Jumlah	1.279 jiwa	1.342 jiwa	100%

<sup>3</sup> Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2009

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Karangrejo berdasarkan kelompok umur, berjumlah 2.621 jiwa orang dengan perincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.279 jiwa, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.342 jiwa. Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian dari jumlah penduduk tersebut yang mendominasi adalah umur 26-35 tahun, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang berumur 26-35 tahun lebih banyak dari jumlah penduduk yang lain.

#### 5. Jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan

Tabel 4

Jumlah Penduduk menurut Agama<sup>4</sup>

No.	Agama	Jumlah	Persentasi
1.	Islam	2.620 orang	99%
2.	Kristen Katholik	1 orang	1%
3.	Kristen Protestan	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah		100%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa, mayoritas penduduk Desa Karangrejo sebagian besar beragama Islam yakni sebanyak 2.620 orang. Jadi tidak mengherankan lagi keseharian masyarakat Desa Karangrejo banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya Islam, seperti sholawatan, tahlilan

<sup>4</sup> Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2009

dan kegiatan lainnya. Warga masyarakat desa Karangrejo hidup dengan masyarakat yang majemuk, walaupun masyarakat hidup dalam lingkungan yang berbeda mereka hidup dengan rukun dan saling hormat menghormati satu sama lain. Hal ini terwujud dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama, seperti yasinan, forum warga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun solidaritas dan rasa saling memiliki satu sama lain di lingkungan masyarakat.

## **6. Sarana Prasarana dan Organisasi Desa**

### **a. Sarana dan prasarana pendidikan**

Di Desa Karangrejo dapat dikatakan sarana dan prasarana masih dikategorikan kurang memadai. Padahal kalau kita melihat bahwa dalam proses belajar kurang adanya sarana dan prasarana yang memadai tidak akan menunjang proses pembelajaran yang baik. Adanya sarana dan prasarana pendidikan dapat memotivasi masyarakat dalam pendidikan. Adanya pendidikan diharapkan mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan. Dengan kata lain adanya pendidikan akan melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan melanjutkan pembangunan di Desa Karangrejo kelak. Berikut data sarana dan prasarana pendidikan di Desa Karangrejo:

Tabel 5

Sarana dan prasarana pendidikan<sup>5</sup>

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	TK	2 buah
2.	SD	1 buah
3.	MI	1 buah
4.	SMP	-
5.	SMA	-
6.	Perguruan Tinggi	-

Dari data dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Karangrejo masih kurang menunjang proses pendidikan masyarakat setempat. Dengan minimnya fasilitas pendidikan merupakan kendala yang sangat berarti bagi kemajuan pendidikan Desa Karangrejo. Fasilitas pendidikan hanya sebatas SD sehingga untuk melanjutkan ke jenjang SMP masyarakat harus ke kecamatan.

Berikut akan dipaparkan sarana dan prasarana pendidikan beserta jumlah guru, tenaga kerja dan jumlah siswa.

---

<sup>5</sup> Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2009

Tabel 6

Saran dan prasarana Sekolah Dasar Negeri<sup>6</sup>

No.	Sarana dan prasarana	Jumlah
1.	Murid	169 orang
2.	Ruang kelas	6 orang
3.	Guru/pengajar	8 orang
4.	Gedung Sekolah	1 gedung

Tabel 7

## Sarana dan prasarana Sekolah Madrasah Ibtidaiyah

No.	Sarana dan prasarana	Jumlah
1.	Murid	200 orang
2.	Ruang kelas	6 orang
3.	Guru/pengajar	10 orang
4.	Gedung Sekolah	1 gedung

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai, terlihat dengan tenaga pengajar yang cukup memadai dalam suatu lingkup desa.

**b. Sarana dan prasarana peribadatan**

Melihat data Desa Karangrejo berdasarkan kepercayaan masyarakat yakni sebagian besar beragama Islam, oleh karena itu saran dan prasarana peribadatan seperti Masjid, musholah, lebih banyak

<sup>6</sup> Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2009





Dari data diatas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan masyarakat yang tersedia di Desa Karangrejo maiz kurang baik dari segi kualitas dan kuantitas. Dengan minimnya fasilitas kesehatan tersebut maka banyak masyarakat yang berobat hingga ke kecamatan bahkan ke kabupaten dan ke kota lain. Adanya sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan ini merupakan tolak ukur dari pengimplementasian tata pemerintahan desa dalam pola hubungan antara masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sipil di Desa Karangrejo.

## 7. Tenaga Kesehatan Di Desa Karangrejo

Tabel 10

### Tenaga Kesehatan

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter	-
2.	Perawat	2 orang
3.	Bidan	2 orang
4.	Dukun terlatih	2 orang
5.	Kader Posyandu	30 orang

Dari data diatas dapatlah diketahui bahwa di Desa Karangrejo masih minimnya tenaga kesehatan bagi proses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan pola hubungan pemerintah Desa dengan masyarakat, berupa pemberian pelayanan dalam bidang kesehatan kepada masyarakat.

## 8. Sarana dan prasarana perekonomian

Tabel 10

Sarana dan prasarana perekonomian

No.	Fasilitas perekonomian	Jumlah
1.	Toko	10 buah
2.	Kios	5 buah
3.	warung	8 buah
4.	Perkreditan Rakyat	1 buah

Dari data diatas sangatlah jelas bahwa sumber perekonomian masyarakat tidak hanya dari segi pertanian yang dipaparkan sebelumnya, melainkan masyarakat terlibat dalam arena produksi dan pendistribusian perekonomian kepada masyarakat desa. Dan ini memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan desa Karangrejo dalam mewujudkan otonomi khususnya di Desa Karangrejo sendiri.

## 9. Organisasi kesenian dan kebudayaan

Kehidupan dalam masyarakat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana, sebab hal ini menyangkut pola hubungan dengan masyarakat setempat. Mengenai sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 11

Organisasi kesenian dan kebudayaan<sup>7</sup>

No.	Jenis kesenian/kebudayaan	Jumlah
1.	Wayang	-
2.	Keroncong	-
3.	Qosidahan	3 buah
4.	Sholawatan	1 buah
5.	Hadrohan/banjari	1 buah

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat desa Karangrejo masih kental dengan kebudayaan Islam. Data ini dimasukkan karena organisasi-organisasi seperti ini merupakan bentuk keberadaan dan keikutsertaan masyarakat dalam tata pemerintahan desa. Hal ini dapat dikatakan bahwa elemen-elemen masyarakat desa Karangrejo sudah berdaya dengan ditunjukkanya kebudayaan tersebut.

---

<sup>7</sup> Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2009

## 10. Organisasi olah raga

Tabel 12

### Organisasi olah raga

No.	Fasilitas olah raga	Jumlah
1.	Sepak bola	5 kelompok
2.	Basket	1 kelompok
3.	Tenis meja	3 kelompok
4.	Volley ball	3 kelompok
5.	Senam aerobis	4 kelompok

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa organisasi dibidang olah raga cukup memberikan motivasi kepada masyarakat. Ini adalah dampak dari elemen pemerintahan desa yang memebrikan motivasi kepada masyarakat. Maka dari sinilah masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan tata pemerinahan desa.

## 11. Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 13

### Organisasi Elemen Tata Pemerintahan Desa

#### a. Kelompok Masyarakat Politik

No.	Kelompok masyarakat politik	Jumlah
1.	Badan Perwakilan Desa (BPD)	1 kelompok

**b. Kelompok Masyarakat Sipil**

No.	Kelompok masyarakat sipil	Jumlah
1.	LPMD	1 kelompok
2.	KKLPMD	5 kelompok
3.	Arisan PKK Desa	1 kelompok
4.	Karang Taruna	5 kelompok
5.	Kelompok Tani	3 kelompok
6.	Bina keluarga Balita	1 kelompok
7.	KKB Qiro'ati	6 kelompok
8.	Kelompok usep Karang taruna	1 kelompok

Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa di desa Karangrejo ini terdapat kelompok masyarakat politik, yang mana kelompok masyarakat politik ini mempunyai fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Dalam kelompok ini terdiri dari satu kelompok. Selain kelompok masyarakat politik di Desa Karangrejo ada kelompok masyarakat sipil yang mana kelompok ini adalah suatu ajang atau bentuk bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya demi terciptanya masyarakat sipil yang baik.

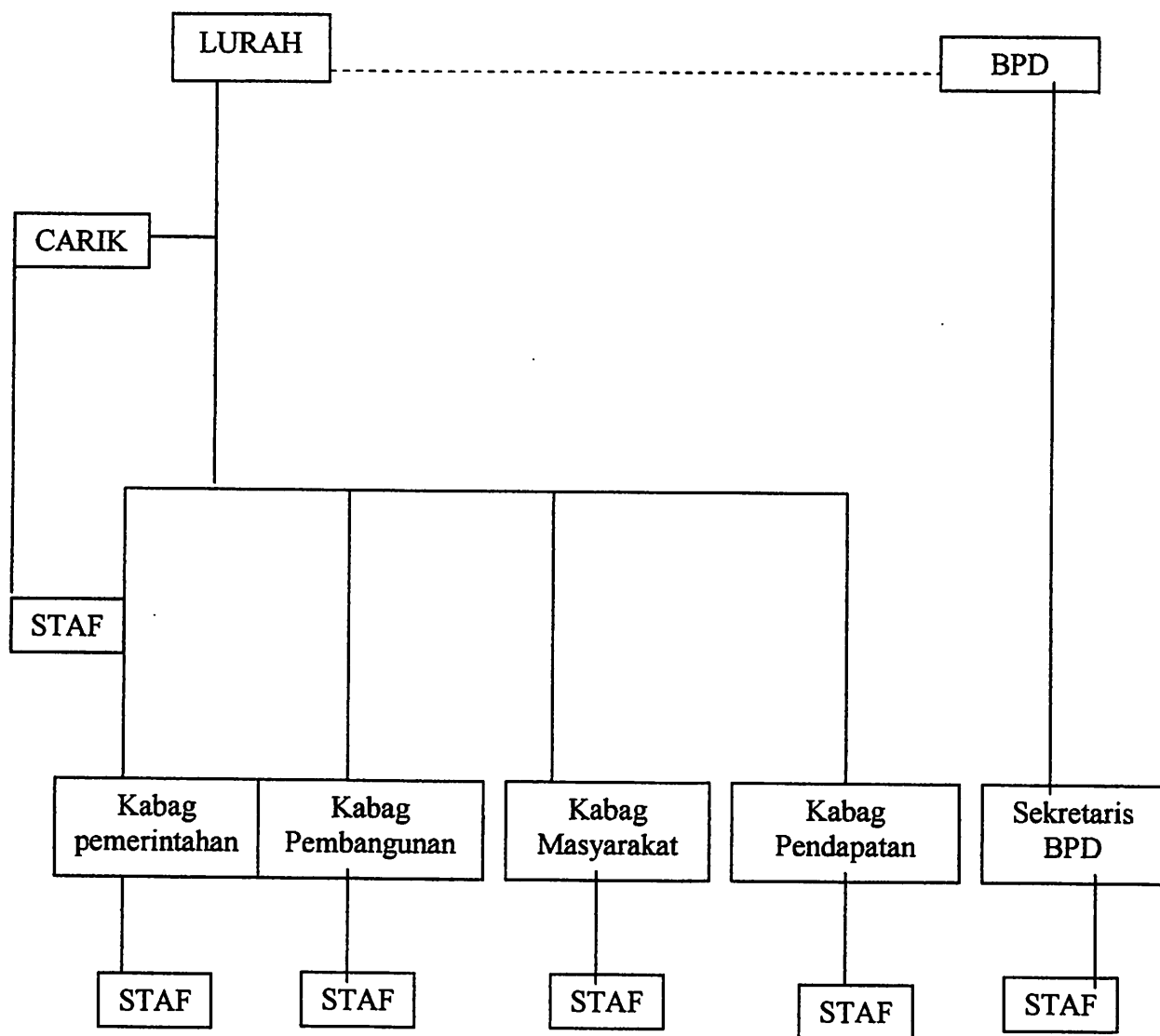
**c. Kelompok masyarakat ekonomi**

Mengenai organisasi masyarakat ekonomi, pada lokasi penelitian belum terbentuk secara kelembagaan. Jadi masyarakat

ekonomi ini belum mampu memformulasikan terbentuknya ekonomi guna mengartikulasikan hubungan mereka dengan pemerintahan desa.

## 12. Organisasi Pemerintahan Desa

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Keterangan:

————— = Garis komando

----- = Garis koordinasi

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa di Desa Karangrejo, adanya organisasi pemerintahan desa, dimana organisasi pemerintahan desa Karangrejo dipimpin oleh seorang lurah desa, lurah desa dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh beberapa para pamong desa adalah carik, staff, dan termasuk kabag-kabag yang ada di jajaran pemerintahan desa. Para pamong ini bertugas membantu lurah desa dalam menjalankan program-program kerjanya.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Identitas Informan**

Dalam memperoleh data-data yang kredibel didalam skripsi ini atau hasil penelitian, seperti yang dipaparkan dalam unit analisis yakni data-data ini diperoleh dari Desa Karangrejo, kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan informan untuk mendukung proses mendapatkan informasi yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yang artinya pengambilan informan diambil sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian, dan pemilihan informan dianggap betul-betul mengetahui permasalahan yang terjadi. Dengan metode yang seperti ini dianggap mewakili dari keseluruhan unsur yang ada. Dengan tidak mengurangi nilai dari kredibilitas dari data tersebut maka peneliti menggunakan metode purposive tersebut.

Adapun jumlah informan yang diperoleh yakni sebanyak 25 informan yang meliputi pemerintahan desa seperti Bapak Lurah, Sekretaris Desa, Kabag pembangunan, Kabag Kemasyarakatan, Kabag Pendapatan, dua dari Badan Permusyawaratan Desa, ketua LPMD Desa Karangrejo, satu orang dari kelompok yasinan Ibu-Ibu, satu dari golongan masyarakat sipil yang meliputi anggota paguyuban yang bergerak dalam bidang pembangunan Desa, serta sebelas orang dari warga masyarakat yang peduli akan pembangunan dan kemajuan wilayahnya.



Adapun identitas dari para informan tersebut yang didasarkan pada lima kategori:

1. Tingkat pendidikan

Tabel 1

Identitas Informan berdasarkan tingkat pendidikan<sup>1</sup>

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1.	Perguruan Tinggi	3 informan	10%
2.	SLTA	12 informan	50%
3.	SLTP	6 informan	25%
4.	SD	4 informan	15%
	Jumlah	25 informan	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa latar belakang pendidikan para informan sebagian besar dari pendidikan setara SLTA. Dalam hal ini informan merupakan sebuah informan yang mengerti akan permasalahan yang terjadi, sehingga dalam memperoleh data primer tersebut benar-benar mempunyai kredibilitas yang cukup tinggi, meskipun latar belakang pendidikan minimal SD, namun para informan ini tetap aktif dan terlibat kedalam tata pemerintahan Desa Karangrejo. Dari latar belakang yang berbeda-beda dari informan tersebut akan memberikan suatu data-data yang bervariasi dan tentunya mewakili dari kepentingan masyarakat ditempat tersebut.

---

<sup>1</sup> Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2009

## 2. Agama

Tabel 2

Identitas Informan berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Persentasi
1.	Islam	25 informan	100%
2.	Kristen	-	
3.	Khatolik	-	
4.	Hindu	-	
5.	Budha	-	
	Jumlah	25 informan	100%

Dari latar belakang kepercayaan yang dianut oleh informan, hampir semua dari informan beragama Islam, dalam hal ini nara sumber memberikan informasi (data) yang berbeda, para informan memberi informasi dengan apa yang mereka ketahui tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Namun hanya sebagai latar belakang Agama atau kepercayaan yang dianut oleh para informan.

### 3. Tingkat usia

Tabel 3

Identitas Informan berdasarkan tingkat umur

No.	Usia	Jumlah	Persentasi
1.	20-30	3 informan	15%
2.	31-40	7 informan	20%
3.	41-50	10 informan	45%
4.	51-60	5 informan	20%
	Jumlah	25 informan	100%

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa informan yang paling dominant sebagian besar adalah usia 40 Tahun keatas. Hal ini dikarenakan para informan sebagian besar adalah para perangkat desa dan para tokoh masyarakat yang sudah lama berkiprah dan aktif dalam tata pemerintahan desa dan para informan ini adalah orang-orang yang peduli akan kemajuan desa.

#### 4. Jenis kelamin

Tabel 4

Identitas informan berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	19 informan	75%
2.	perempuan	6 informan	25%
	Jumlah		100%

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar informan berasal dari jenis kelamin laki-laki, sebagian besar informan laki-laki menduduki jabatan terpenting dalam unit pemerintahan Desa Karangrejo artinya di Desa Karangrejo isu gender sebagai pemimpin belum begitu kelihatan dan kaum perempuan masih dianggap terbelakang dalam konteks tata pemerintahan desa dan termasuk kepada lingkup masyarakat sipil sebagai penggerak bagi masyarakat desa khususnya bagi kaum perempuan. Dalam hal ini informan perempuan juga bergerak dalam bidang perkumpulan PKK, arisan, dan lain-lain. Tetapi kuantitas masyarakatnya hanya sebagian kecil, desa Karangrejo sudah mulai berdaya dan bisa mengelolah dalam kemajuan desa artinya kaum perempuan disini sudah mulai menduduki posisi yang terpenting dalam tata pemerintahan desa.

## 5. Organisasi masyarakat

Tabel 5

### Identitas informan berdasarkan organisasi

No.	Organisasi masyarakat	Jumlah	persentase
1.	kepala desa	1 informan	4%
2.	Ketua LPMD	1 informan	4%
3.	Sekretaris Desa	1 informan	4%
4.	Kabag Pembangunan	1 informan	4%
5.	Kabag Pendapatan	1 informan	4%
6.	Kabag Kemasyarakatan	1 informan	4%
7.	BPD	2 informan	4%
8.	PKK	2 informan	4%
9.	Tokoh Masyarakat	5 informan	20%
10.	Masyarakat	10 informan	40%
	Jumlah	25 informan	100%

Dari data diatas dapatlah dijadikan acuan bahwa informan merupakan orang-orang terpenting di desa dan sudah mewakili seluruh masyarakat yang ada. Dalam pengambilan data diatas sebagian besar didominasi oleh tokoh masyarakat dan masyarakat, dikarenakan mereka adalah merupakan kelompok independen dan terlepas dari intervensi pemerintahan desa.



kantor Kepala Desa dan fasilitas masyarakat lainnya yaitu pembangunan dalam desa.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa peranan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin sudah membawa aspirasi masyarakat , hal ini terlihat dengan program pemerintah desa yang melibatkan masyarakat seperti Forum Musyawarah Desa selama ini sudah mulai dilaksanakan dan terbukti sudah muncul sebagian dari aspirasi masyarakat lewat forum tersebut. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat tidak membuat forum warga ini ditinggalkan oleh pemerintahan desa, karena hal itu merupaka sebuah forum aspirasi masyarakat dalam ruang lingkup yang kecil.

Kepala desa diharapkan menjadi wakil desa dan suri tauladan, seperti sikap dan tata krama harus dijaga, sebab Kepala Desa adalah pelindung masyarakat dari pengaruh luar. Kekuasaan Kepala Desa dapat mengatur masyarakatnya secara keseluruhan tetapi bukan berarti memerintah seenaknya, melainkan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat Kepala desa juga sebagai motivasi dalam masyarakat. Berbicara mengenai motivasi khususnya di Desa Karangrejo ini Kepala Desa cukup memberikan motivasi kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dari Ibu Muniroh bahwa:

Warga masyarakat disk diberikan dorongan oleh Kepala Desa, yakni memotivasi kami untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik yang ada didesa ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mardi, *Wawancara*, Gresik, 2 November 2009.

<sup>4</sup> Muniroh, *Wawancara*, Gresik, 3 November 2009.

Dari pendapat diatas dikatakan bahwa Kepala Desa sering memotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembangunan, masyarakat dimintai aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, misalnya bersama-sama memperbaiki jalan raya, perbaiki saluran irigasi, maupun memberikan bantuan berupa swadaya masyarakat.

Dalam kaitanya dengan peran Kepala Desa sebagai motivasi bagi masyarakat, ada dua hal yang memaknai peran itu yakni motivasi yang diberikan kepada masyarakat yang sifatnya dikerahkan dari atas dan peran secara mandiri berdasarkan kesadaran Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun dalam sistem pemerintahan, memotivasi atau mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa, sebab tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desa berdampak ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan serta hasil yang diperoleh tidak memihak kepada kebutuhan masyarakat pada umumnya. Sementara Kepala desa merupakan kepala dalam suatu wilayah yang diakui secara hukum yang salah satu tugasnya adalah menjalankan fungsinya untuk menjalankan pembangunan yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pembangunan desa Kepala Desa harus melakukan pengawasan, sebab ini merupakan tanggung jawab Kepala Desa dalam pelaksanaan program kerjanya, seperti dalam pemanfaatan potensi-potensi desa. Wawancara dilakukan peneliti pada salah seorang warga masyarakat yaitu Bapak Abdullah:

Kepala desa dalam menjalankan program-program kerjanya selalu melakukan pengawasan seperti peningkatan pada hasil pertanian,



Kepala desa terjun langsung pada masyarakat dan melihat kondisi pertanian yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Mengenai potensi-potensi desa Kepala Desa selalu memberi masukan kepada warga masyarakat, wawancara dilakukan peneliti pada Ibu Badrus yaitu;

Sebagai seorang pemimpin harus dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Hal ini kami dapatkan dari pemimpin yang sekarang ini, pemimpin ini melakukan tugasnya dengan baik, seperti kepala desa mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat mengenai pembangunan desa. Kami menilai bahwa pemimpin yang kami cari-cari dan yang kami harapkan selama ini adalah pemimpin yang sekarang ini, dimana kami menganggap Kepala Desa ini adalah pemimpin yang demokratis.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwa seorang pimpinan dapat dikatakan pemimpin apabila ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Berkaitan dengan pemimpin, seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus dapat memberikan contoh kepada warganya seperti dalam pengambilan keputusan yang ada vdan termasuk dalam hal pengelolaan urusan wilayah yang dipimpinnya. Salah seorang warga masyarakat menyatakan bahwa;

Kepala desa dalam kepemimpinannya ini, dalam hal pengambilan sudah cukup baik, tegas, bujaksana, dan konsisiten terhadap apa yang ia perbuat, maksudnya apabila ia melakukan kesalahan dengan segenap unsur elemen pemerintah desa, kepala desa ini mengatakan; bahwa kami akan konsisten dengan tugas kami dengan peraturan yang ada.

Berkaitan dengan hal kemampuan Kepala Desa dalam pengambilan keputusan hal diatas diperkuat oleh Bapak Abdur Rohman salah seorang tokoh masyarakat desa Karangrejo mengungkapkan bahwa:

Menurut saya Kepala Desa dalam menjalankantugas yang diembannya sudah cukup membawa kepada pemimpin yang diharapkan, seperti

---

<sup>5</sup> Abdullah, *Wawancara*, Gresik, 4 November 2009.

<sup>6</sup> Abdur Rohman, *Wawancara*, Gresik 4 November 2009

kepada pemimpin yang demokratis yakni Kepala Desa ini benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini berdasarkan penilaian kami bahwa Kepala Desa ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan aspirasi masyarakat tanpa adanya kepentingan golongan.

Berdasarkan wawancara diatas kita lihat bahwa pemimpin desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sudah dapat digolongkan kepada pemimpin yang mengayomi masyarakat, dan menjadi pemimpin yang demokratis maksudnya pemimpin yang memperhatikan kepentingan anggota masyarakatnya bukan memperhatikan kepentingan pribadi maupun golongan.

Dalam pengembangan otonomi di desa Karangrejo peranan Kepala Desa sangat menentukan dan mendorong berjalannya proses perwujudan otonomi yang tertinggal. Maju atau tidaknya suatu desa tergantung kepada Kepala Desa yang memimpinnya dan menentukan kearah mana desa akan dibawah, yakni dalam hal pengambilan kebijakan dan pembangunan desa.

Sebagai seorang pemimpin ia dapat menampung dan mengakomodasi aspirasi dari warganya sendiri. Seperti yang kita bicarakan diatas bahwa semua itu adalah perwujudan dari otonomi desa itu sendiri, dimana otonomi berbicara mengenai kewenangan di tangan desa serta masyarakat dalam pengelolaan urusan desa serta harus berdasarkan keinginan dan kemampuan masyarakat. Hal semacam ini telah kita dapatkan dalam pengelolaan pemerintahan khususnya desa Karangrejo yang semua ini berkat kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat yang selalu mengadakan hubungan dan chek and balance pada kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan desa.

## 2. Partisipasi politik masyarakat dalam pembuatan kebijakan untuk mewujudkan otonomi

Sebelum peneliti lebih jauh memaparkan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mewujudkan otonomi. Terlebih dahulu peneliti akan memaparkan suatu arena dan aktor-aktor didalam masyarakat, yakni kita ketahui bahwa masyarakat politik adalah arena masyarakat mengorganisir dirinya sendiri untuk merebut hak absah untuk mengontrol kekuasaan Publik dan aparatur Negara. Masyarakat dibebaskan berkarya mengeluarkan segala bentuk pemikiran yang berguna untuk kemajuan Desanya.

Partisipasi politik mempunyai makna yang berarti bagi pembangunan. Masyarakat terlibat secara independen dan mandiri dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah yang demokratis. Sehingga masyarakat dapat memberikan aspirasi dan partisipasinya dalam pembangunan desa seperti: dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan membangun desa, memberikan ruang bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Kata kunci dalam pengembangan demokratis adalah partisipasi masyarakat secara teoritis. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan secara terbuka dan keikutsertaan masyarakat. Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda penekanannya. Keterlibatan secara terbuka menyangkut *siapa* saja yang terlibat, sedangkan keikutsertaan berbicara bagaimana msyarakat terlibat. Keterlibatan berarti bagaimana memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam pembangunan.

Keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan pada elemen tata pemerintahan desa peneliti akan menguraikan hasil dari petikan

wawancara dari salah seorang anggota BPD yaitu Asrukin menyatakan bahwa:

Sebagai elemen tata pemerintahan desa menurut pandangan saya, masyarakat desa Karangrejo terlibat dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan berupa adanya perwakilan masyarakat dalam tata pemerintahan desa. Dalam hal ini BPD berfungsi sebagai penyambung aspirasi masyarakat, agar masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan desa.<sup>7</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang jajaran BPD yakni menjabat sebagai anggota yakni Ibu Sri Hariani menyatakan bahwa:

Salah satu usaha masyarakat untuk memberikan partisipasinya dalam pengambilan kebijakan adalah dengan adanya keterlibatan secara langsung dalam pengambilan kebijakan. Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya keterlibatan secara ikut-ikutan melainkan dengan ketentuan yang ada, misalnya adanya organisasi berupa badan penyalur aspirasi dan ajang keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada elemen tata pemerintahan desa.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat sudah mampu berdaya dan terlibat dalam pengambilan kebijakan pada elemen pemerintahan desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perwakilan masyarakat, sekaligus sebagai penyalur aspirasi demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Disamping organisasi tersebut bergerak dalam bidang perwakilan, organisasi ini juga berorientasi pada pembangunan desa dengan prinsip kesukarelaan tanpa intervensi dari pihak manapun. Berangkat dari kepentingan bersama masyarakat menyalurkan aspirasi dan mengikutsertakan diri pada pengambilan kebijakan guna masyarakat mengetahui bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa terwujud.

---

<sup>7</sup> Asrukin, *Wawancara*, Gresik, 6 November 2009

<sup>8</sup> Sri Hariani, *Wawancara*, Gresik, 6 November 2009.

Keberadaan organisasi masyarakat desa sangat membawa perubahan yang berarti terlihat dari hasil wawancara dari salah satu warga yakni dari Bapak Subakir mengungkapkan bahwa:

Warga desa Karangrejo membuat paguyuban yang bergerak dalam bidang penyaluran aspirasi masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan daerahnya. Organisasi masyarakat ini menyalurkan aspirasi warga, serta ikut dalam pengambilan kebijakan pada elemen pemerintahan desa.<sup>9</sup>

Dari wawancara diatas maka akan lebih menguatkan argumen dari peneliti, bahwa pada dasarnya daerah penelitian ini masyarakatnya sudah terlihat dan mampu melibatkan dirinya sebagai bagian dalam elemen pemerintahan desa yang memberikan partisipasi berupa keterlibatan dalam hal pengambilan kebijakan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pembangunan daerahnya. Kelompok inilah yang akan memberikan masukan atau pendapat dari masyarakat itu sendiri. Hal semacam ini akan memberikan kontribusi dan masukan terhadap proses pembangunan desa dalam kerangka otonomi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan berimbas kepada kemajuan tata pemerintahan desa, yang sesuai dengan konsep otonomi yakni membangun masyarakat desa demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dewasa ini pemerintahan desa Karangrejo terus berupaya menata pemerintahan untuk menuju pada tatanan yang demokratis dan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak dan ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses pembangunan desa.

---

<sup>9</sup> Subakir, *Wawancara*, Gresik, 6 November 2009.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyaknya kekurangan yang perlu dibenahi dan ditata ulang oleh pemerintah desa Karangrejo, supaya pemerintah desa dapat mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat, adanya ruang dan hak yang diberikan kepada masyarakat yang disertai oleh akses dalam perencanaan terhadap pembangunan wilayah.

Hal senada juga diungkapkan oleh warga masyarakat yakni Bapak Sutaji mengungkapkan bahwa:

Bahwasanya masyarakat desa, khususnya desa Karangrejo sudah banyak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang ada, hal ini sangat memberikan kontribusi kepada segenap elemen pemerintahan desa dan dalam hal pembuatan dan pengambilan kebijakan desa.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapatlah ditanggapi bahwa dalam konteks desa, sehingga dalam lokasi penelitian menunjukkan bahwa secara langsung masyarakat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Seperti yang kita lihat pernyataan diatas bahwa masyarakat memberikan partisipasinya atau pendapat-pendapatnya dalam membangun desanya. Dan perlu kita sadari bahwa secara tidak langsung masyarakat sebagai sekumpulan masyarakat politik sudah memberikan pemikirannya demi terselenggarakannya pemerintahan desa. Hal ini dapat kita lihat masyarakat memberikan kritikan serta masukan terhadap pemasalahan desa. Artinya bahwa masyarakat telah menjalankan peran sertanya sebagai masyarakat politik yang mempertahankan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan tidak hanya partisipasi dari masyarakat saja tetapi yang dibutuhkan adalah keterlibatan dari pemerintahan itu sendiri untuk melakukan sosialisasi

---

<sup>10</sup> Sutaji, *Wawancara*, Gresik, 6 November 2009.

dengan masyarakat. Namun secara substansial masyarakat harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dalam tata pemerintahan desa yang tentunya akan melibatkan seluruh elemen pemerintahan desa. Disamping itu masyarakat juga mampu membentuk dan mendorong partisipasi masyarakat itu sendiri demi terlaksananya kemandirian daerahnya.

Berbeda juga dengan pendapat dari Bapak Kasmaji yang mengungkapkan bahwa:

Diera otonomi daerah sekarang ini dituntut untuk kemandirian desanda, guna melaksanakan urusan desa tanpa ada intervensi dari pemerintahan pusat. Dalam hal ini pemerintah desa melaksanakan tata pemerintahan desa dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desa sudah dirasakan oleh kalangan pemerintahan desa dan masyarakat. Tetapi sekarang ini bagaimana masyarakat lebih meningkatkan partisipasi dan kepeduliannya yang sudah ada, agar tujuan bersama dapat tercapai. Dengan adanya lembaga yang menampung aspirasi dari masyarakat seperti BPD akan bisa membuat roda pemerintahan yang dijalankan pemerintah desa terawasi dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>11</sup>

Menanggapi dari hasil wawancara diatas kita dapat analisa bahwa pada dasarnya pemerintahan di Desa Karangrejo sudah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwasannya pemerintahan desa dalam melaksanakan tata pemerintahan desa sudah melibatkan masyarakat secara penuh, dengan adanya lembaga yang bertanggung jawab yaitu adanya BPD yang akan mewujudkan tujuan bersama. Meskipun dalam prosesnya belum maksimal, hal ini ditunjukkan untuk lebih meningkatkan kepedulian masyarakat setempat terhadap pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, akan membuat antusiasme masyarakat dengan mengambil andil serta

---

<sup>11</sup> Kasmaji, *Wawancara*, Gresik, 7 November 2009.

menyumbangkan pikirannya demi terlaksananya pembangunan yang dinamis dan berkesinambungan.

Keterlibatan masyarakat desa dalam memberikan peran dan partisipasinya dalam pengambilan kebijakan untuk mewujudkan otonomi diperkuat dari hasil wawancara oleh Ibu Mujadah, menyatakan bahwa:

Agar dapat membuat masyarakat politik di desa saya maka masyarakat secara bersama-sama berusaha untuk membangun desa dan bersaing dalam taraf kewajaran. Dalam usaha membentuk masyarakat politik demi membangun desa masyarakat sudah mulai kritis, hal ini terlihat pada keinginan masyarakat untuk membangun dan merawat desa dan masyarakat merasa bahwa siapa lagi kalau bukan kita yang memajukan demi terciptanya kemandirian dalam membangun desa.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti dapat memaparkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah desa adalah berkat adanya partisipasi masyarakat walaupun masih semu, maksudnya adalah dalam menyikapi keberadaan otonomi belum sepenuhnya terealisasi. Terbukti dengan kurangnya peran serta masyarakat dalam menyikapi otonomi. Hal ini menunjukkan bahwa, kepedulian masyarakat belum tertanam pada diri masyarakat itu sendiri oleh karena itu dibutuhkan rasa saling memiliki antar masyarakat yang bertujuan untuk membangun nilai-nilai kemandirian.

Menambah hasil wawancara diatas peneliti mengambil argumen dari Kepala desa sendiri yakni:

Sejauh ini masyarakat sudah berpartisipasi dalam pembangunan desa, hal ini terbukti dengan adanya peran serta masyarakat, dalam lembaga politik mereka melaksanakan program-program yang diadakan oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan proses pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam non materi tetapi juga dari segi materi yang memberikan bantuan dana untuk mendukung terlaksananya pembangunan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Mujadah, *Wawancara*, Gresik, 7 November 2009.

<sup>13</sup> Subhan, *Wawancara*, Gresik, 7 November 2009.



Hal senada juga diungkapkan salah satu ketua RT yaitu Bapak Ali

Ridhwan:

Sejauh ini masyarakat sudah terlibat dan memberikan peran sertanya dalam upaya membentuk masyarakat politik misalnya dalam arena pemilihan kepala desa masyarakat membentuk suatu organisasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemilihan tersebut. Dalam kerangka mewujudkan kerangka otonomi dibutuhkan kemandirian dari daerah itu sendiri, yang berkaitan dengan pembangunan desa, diperlukan keahlian dan keterampilan serta daya kreatifitas yang tinggi, termasuk dalam pemilihan kepala desa masyarakat harus mampu menentukan pilihannya demi kelangsungan masa depan desanya.<sup>14</sup>

Menanggapi permasalahan diatas bahwa, dalam persoalan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan masyarakat politik dilingkungan desa untuk membuat suatu kemandirian bagi masyarakat dalam mengelola daerahnya tanpa adanya campur tangan supra desa terlebih dalam proses terwujudnya otonomi. masyarakat sudah cukup terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti: kegiatan yang dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK dalam mengembangkan kreatifitas masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, serta bagi kaum Ibu-Ibu. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat benar-benar mandiri dan independen dalam menentukan pilihan mereka, demi terfokusnya masyarakat terhadap otonomi yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil cuplikan wawancara dengan seorang lembaga pemberdayaan masyarakat desa yaitu Bapak Dasyanto menyatakan bahwa:

Menanggapi kondisi dari pemerintahan desa sekarang ini, masyarakat sudah cukup terbuka dengan pemerintah desa, seperti dalam hal pengambilan kebijakan, pemerintah melibatkan masyarakat setempat guna mengetahui sejauh mana masyarakat ambil andil dalam tata pemerintahan desa. Hal ini untuk meningkatkan kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam melaksanakan tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat

---

<sup>14</sup> Ali Ridhwan, *Wawancara*, Gresik, 7 November 2009.

dalam kegiatan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah desa seperti adanya forum-forum diskusi yang bertujuan sebagai penyambung aspirasi masyarakat.<sup>15</sup>

Menambahkan hasil wawancara mengenai keterlibatan masyarakat seorang kabag pendapatan yaitu Bapak Sutrisno Hadi menyatakan bahwa:

Dalam menyikapi keberadaan otonomi yang dilaksanakan di tatanan pedesaan, masyarakat ikut memberikan dukungan terhadap pembangunan. Masyarakat menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Adanya kerjasama antar masyarakat dalam lingkungan desa berdampak pada terlaksananya tujuan pemerintah desa dalam meningkatkan kreatifitas dan kepedulian masyarakat terhadap tempat tinggalnya.<sup>16</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk mewujudkan otonomi di Desa Karangrejo, sudah cukup membawa pada pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat desa dalam konsep otonomi adalah sebagai ajang kemandirian masyarakat dalam menyikapi kondisi desa seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang otonomi adalah sebuah asas desentralisasi yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat guna mengembangkan kreatifitasnya dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap wilayahnya.

Pengembangan kreatifitas masyarakat di desa Karangrejo sendiri dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif untuk memacu kepedulian masyarakat tersebut. Masyarakat mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa sudah mulai menyadari

---

<sup>15</sup> Dasyanto, *Wawancara*, Gresik, 8 November 2009.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Wawancara*, Gresik, 8 November 2009.

arti pentingnya kemandirian dalam menyikapi otonomi demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

### 3. Perwujudan Otonomi

Krisis yang terjadi di Indonesia berdampak pada krisis ekonomi yang berdampak pada peningkatan jumlah masyarakat miskin di pedesaan, bertambahnya jumlah pengangguran serta menimbulkan berbagai permasalahan sosial diberbagai daerah. Di era sekarang ini pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dituntut untuk semakin terbuka, bertanggung jawab, mengutamakan pelayanan Publik kepada masyarakat.

Pembangunan yang diarahkan kepada pembangunan ekonomi kerakyatan, sumberdaya manusia, dalam rangkah mewujudkan otonomi. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa diharapkan desa diberi peluang untuk melakukan pengelolaan petensi sumberdaya alam yang ada di daerahnya, dan maju tidaknya desa tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat, melainkan lebih bertumpu kepada kemampuan desa dalam mengembangkan kreatifitasnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan otonomi di Desa Karangrejo, kecamatan Ujungpangkah, kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dalam pemerintahan desa.
2. Pemberdayaan aparat pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan.
3. Peningkatan produksi bahan pangan bagi masyarakat.
4. Peningkatan pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat.

5. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang partisipasi politik masyarakat.

Berhasil atau tidaknya desa dalam membangun wilayah tergantung bagaimana desa tersebut mempersiapkan diri. Sekarang ini desa dituntut dalam kemandirian dalam pengelolaan aset wilayahnya. Dari sinilah ada pendapat dari Bapak Mufarikh menyatakan bahwa:

Otonomi desa di desa Karangrejo sendiri sudah ada semenjak dicetuskannya Undang-undang otonomi, sehingga kami berusaha melakukan apa yang tertera dalam Undang-undang tersebut seperti kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh desa sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat. Sebab otonomi menjadi harapan bagi desa agar terlepas dari intervensi pemerintah pusat dan siap tidaknya kita harus berusaha untuk menghadapi otonomi dengan sebaik-baiknya.<sup>17</sup>

Dari pendapat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa desa Karangrejo dalam mengadapi otonomi yang sekarang ini, telah mempersiapkan diri dengan berbekal kekompakan dan kemandirian dalam menciptakan pembaruan bagi desa. Dalam kondisi bagaimanapun kemandirian dalam desa sudah memiliki kebebasan atau kesempatan untuk melakukan pembangunan sendiri tanpa tergantung lagi pada pemerintah pusat, oleh sebab itu desa harus berusaha untuk mewujudkan otonomi dengan baik.

Pengembangan otonomi di desa Karangrejo telah dilaksanakan secara maksimal, menurut ketua RT 8 Bapak Suparno menyatakan bahwa:

Pengembangan otonomi merupakan suatu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang otonomi yang harus dijalankan oleh pemerintah desa, sehingga desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan pemerintah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mufarik, *Wawancara*, Gresik, 9 November 2009.

<sup>18</sup> Suparno, *Wawancara*, Gresik, 9 November 2009.

Hal senada juga diungkapkan oleh warga masyarakat yang selalu melakukan pengamatan terhadap desanya yaitu Mas Ramat menyatakan bahwa:

Dimana otonomi itu sendiri sudah ada di desa Karangrejo ini, pengembangan otonomi di desa Karangrejo ini berada pada masa transisi dalam artian desa sudah menerapkan yang namanya kemandirian tetapi belum sepenuhnya melakukan kemandirian terhadap urusan pengelolaan wilayah. Seperti pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa dalam hal urusan intern desa termasuk dalam urusan pemerintahan dan keuangan desa.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan pengembangan otonomi, kita melihat bahwa diwilayah pedesaan khususnya di desa Karangrejo dalam melaksanakan Undang-undang otonomi dengan memulai pada pengelolaan urusan pemerintahan sendiri, dan pengelolaan keuangan desa. Kita sadari bahwa otonomi bagi desa adalah hal yang baru dan butuh waktu dalam pengelolaan urusan pemerintah sendiri. di Desa Karangrejo sendiri penerapan otonomi itu sendiri sudah berlangsung semenjak Undang-undang tersebut dikeluarkan, walaupun masih belum sepenuhnya dalam pengelolaan urusan pemerintah sendiri tanpa campur tangan pihak pemerintah pusat, ini merupakan tantangan baru bagi desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan sendiri.

Otonomi tidak terlepas dari aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam hal ini ada pendapat dari Bapak Kustadi menyatakan bahwa:

Dari aspek kelembagaan, desa Karangrejo sudah mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. hal ini disebabkan adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal mengurus urusan pemerintahan desa.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Rahmat , *Wawancara*, Gresik, 9 November 2009.

<sup>20</sup>Kustadi , *Wawancara*, Gresik, 10 November 2009.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada desa dalam hal pengurusan kelembagaan desa agar mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Melihat kewenangan yang diberikan kepada desa dalam hal urusan pemerintahan, hal ini akan mengembangkan pembaruan desa ke dalam hal-hal yang baru. Adapun kewenangan desa adalah sebagai berikut: (1) Bidang Pemerintah; (2) Bidang Pembangunan; (3) Bidang Kemasyarakatan; (4) Bidang Kekayaan dan Pendapatan

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif warga masyarakat. Masyarakat desa baik sebagai suatu kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian yang terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini berdasarkan pada penyelenggaraan otonomi guna mewujudkan masyarakat berdaya dan sejahtera.

Salah satu wujud dari tanggung jawab masyarakat terhadap wilayah tempat tinggalnya adalah dengan mendukung terhadap pemerintahan desa antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif warga masyarakat dalam mewujudkan otonomi. Dalam hal ini menurut pendapat Bapak Katamso menyatakan bahwa:

Selama ini partisipasi masyarakat di desa Karangrejo ini, dalam rangka mewujudkan otonomi sudah cukup berperan. Hal ini terlihat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengembangan otonomi desa yakni adanya kebijakan-kebijakan desa dalam pengembangan wilayah masyarakat mendukung sepenuhnya tanpa adanya kontroversi di tubuh masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Katamso, *Wawancara*, Gresik, 12 November 2009.

Dari pendapat diatas terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan otonomi sudah cukup berperan aktif. Tidak adanya protes dari masyarakat bukan berarti masyarakat tidak mengerti dan tidak tahu akan kebijakan-kebijakan desa melainkan sudah ambil andil dalam pemerintahan desa. Hal ini bermaksud untuk membuat masyarakat berpartisipasi dan ikutserta dalam mewujudkan otonomi.

Dalam mewujudkan otonomi tidak terlepas dari kepemimpinan kepala desa yang memimpin dalam hal ini di ungkapkan oleh salah seorang warga masyarakat yaitu Bapak Baidhowi menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan otonomi di desa kita ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat saja melainkan pola kepemimpinan yang diterapkan atau dijalankan oleh kepala desa juga berpengaruh. Serta kepedulian dari pemimpin desa sendiri dituntut dalam sesuatu yang baru untuk pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat.<sup>22</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa sendiri menyatakan bahwa:

Kita melihat bahwa desa dihadapkan kepada sesuatu hal yang rumit dan butuh suatu kemandirian dan keuletan. Mengena saya menyatakan seperti itu , kemandirian merupakan suatu hal yang barui bagi desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebab ini baru dilakukan oleh desa dan butuh tantangan bagi kami dalam hal memperhatikan kepentingan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan. Serata dalam hal ini tidak terlepas dri dari pemimpin yang memimpinnya, kenapa saya menyatakan seperti itu bukannya saya memihak diri sendiri melainkan butuh keuletan dan kearifan dari pemimpin terlebih dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam konteks mewujudkan otonomi.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat masyarakat diatas kita dapat melihat bahwa suatu tujuan tidak akan terlaksana apabila tidak adanya peran serta dari pemimpin . begitu juga dengan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>22</sup> Baidhowi, *Wawancara*, Gresik, 13 November 2009.

<sup>23</sup> Subhan, *Wawancara*, Gresik, 13 November 2009.

tidak hanya partisipasi masyarakat saja yang dituntut melainkan peran serta dan keaktifan dari pemimpin itu sendiri untuk memperjuangkan wilayahnya. Kita ketahui bahwa seorang pemimpin dapat dikatakan pemimpin apabila seorang pemimpin ini memperhatikan kepentingan masyarakat bukan mendahulukan kepentingan pribadi maupun golongan. Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan hal yang baru dan butuh waktu dalam melaksanakan hal tersebut.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian dapat kita lihat bahwa kepala desa dalam rangka mewujudkan otonomi sudah baik, hal ini terbukti dengan bagaimana pola kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa dalam rangka mewujudkan otonomi sesuai dengan konteks otonomi adalah pemerdayaan desa Karangrejo melakukan pemberdayaan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di Desa Karangrejo adalah:

1. Kegiatan industri rumah tangga dan menengah.
2. Pengembangan ekonomi desa dan pembangunan ekonomi berkelanjutan meliputi pertanian, perikanan serta sumberdaya alam.
3. Pengembangan sumberdaya dan prasarana perekonomian.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa relevansi pola kepemimpinan kepala desa dan partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan otonomi dapat terwujud dalam masyarakat desa, yakni dengan membentuk kelompok-kelompok atau forum warga, serta lembaga-lembaga masyarakat seperti kelompok masyarakat politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi yang terbentuk oleh kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dalam kelompok masyarakat politik terdiri dari lembaga yang ada seperti: Badan Permusyawaratan Desa (BPD dan LPMD), dan kelompok masyarakat sipil memiliki lembaga-lembaga seperti: KKLPM, Arisan PKK Desa, Karang Taruna, Kelompok Tani, Bina keluarga Balita, KKB Qiro'ati, Kelompok usep Karang taruna, serta dalam kelompok masyarakat ekonomi ada lembaga yang terbentuk tetapi masih belum fungsional.

Perkembangan otonomi di Desa, dibutuhkan peranan dari kepala desa itu sendiri dalam membangun daerahnya, hal ini terbukti dengan usaha-usaha Kepala Desa dalam membangun dan memberikan perhatian kepada masyarakat atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam membangun kemandirian. Pemimpin disini sudah menunjukkan kepada pemimpin yang demokratik artinya pemimpin yang memperhatikan kepentingan masyarakat yang dipimpin. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin desa harus dapat menentukan dan memutuskan kebijakan berdasarkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada pada desa tersebut. Hal ini

sangat mempengaruhi terhadap terwujudnya otonomi bagi desa yang sangat dinanti-nantikan masyarakat dikalangan pedesaan. Pola kepemimpinan yang demokratis inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Cara yang ditempuh dalam hal ini adalah dengan memberi dan mengikutsertakan masyarakat dalam forum-forum desa, hal ini bertujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat untuk berperan serta dalam elemen pemerintahan desa.

Sehingga dalam penelitian ini antara pola kepemimpinan kepala desa dan partisipasi politik masyarakat mempunyai relevansi dalam mewujudkan otonomi di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

## **B. Rekomendasi**

Agar penelitian ini dapat membuahkan hasil sebagaimana peneliti harapkan, maka saran dari peneliti diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait. Maka dalam penelitian ini Belum menjawab lebih jauh mengenai eksistensi partai politik lokal dalam mewujudkan otonomi di Desa Karangrejo, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Kiranya masalah dan tema ini dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.



